

# Rencana Strategis 2025-2026



## Kata Pengantar



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 dapat tersusun sesuai waktu yang ditentukan. Secara umum Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026, diarahkan pada 2 tujuan strategis yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya. Dari dua tujuan strategis tersebut dijabarkan ke dalam 3 sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol, menurunnya konflik sosial di wilayah kecamatan, dan meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan renstra ini. Semoga renstra ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam mewujudkan Sanggau Yang Harmonis, Religius, Berbudaya dan Demokratis.

Sanggau, 14 Maret 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SANGGAU  
  
ANTONIUS, S. Sqs  
Pembina Utama MUDA  
NIP. 196511261986031013

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3.1 Maksud .....	2
1.3.2 Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	<b>5</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
2.1.1 Tugas .....	5
2.1.2 Fungsi .....	6
2.1.3 Struktur Organisasi .....	10
2.2. Sumber Daya Organisasi .....	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi .....	12
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	16
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>17</b>
3.1. Permasalahan .....	17
3.2. Isu Strategis .....	18
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>19</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	19
4.2. Cascading Kinerja Organisasi .....	20
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>28</b>
5.1. Strategi .....	28
5.2. Arah Kebijakan .....	28
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP</b> .....	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

---

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun perencanaan strategis (renstra) berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perangkat daerah menyusun renstra sebagai penjabaran dari RPJMD dan menyusun rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 berakhir pada tahun 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah yang akan merumuskan dokumen RPJMD tahun berikutnya, baru dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dokumen perencanaan untuk tahun 2025-2026 belum tersusun. Satu sisi dokumen perencanaan tersebut dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir pada tahun 2024, maka perlu disusun renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau tahun 2025-2026 sebagai acuan dalam perencanaan kerja organisasi dalam mewujudkan harapan masyarakat sesuai urusan pemerintahan yang diamanahkan.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

---

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

---

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan rencana kinerja organisasi dengan indikator kerjanya yang “SMART” dan target kinerja yang realistis untuk diwujudkan pada tahun 2025-2026 sebelum tersusunya dokumen RPJMD kepala daerah terpilih.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dalam menyusun rencana kerja tahunan guna mewujudkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025-2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

---

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penulisan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Organisasi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Permasalahan
- 3.2 Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran PD tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten 2025-2026 dan atau NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah
- 4.2 cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
(indikatornya mengacu pada permendagri yang terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya)
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra 2025-2025 melalui IKU atau IKK)
- BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

---

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah. Sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau. Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

##### 2.1.1 Tugas

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Urusan pemerintahan dimaksud adalah urusan pemerintahan umum. Sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Untuk pelaksanaan tugas tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau didukung dua unit kerja yaitu unit kerja yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dan bersifat tugas utama (lini). Yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan pada unit Sekretariat. Sedangkan yang bersifat tugas lini dilaksanakan pada unit kerja Bidang. Tugas masing-masing unit kerja tersebut sebagai berikut :

1. Sekretariat, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan;
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya agama;
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang politikn dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
4. Bidang Kewaspadaan Nasioanal dan Penanganan Konflik, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen dan penanganan konflik, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

### **2.1.2 Fungsi**

Fungsi yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau adalah:

- a. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut di atas, masing-masing unit kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;
- l. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- m. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama :

- a. perumusan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :
- a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partal politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing ;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan ; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan..
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik :
- a. perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

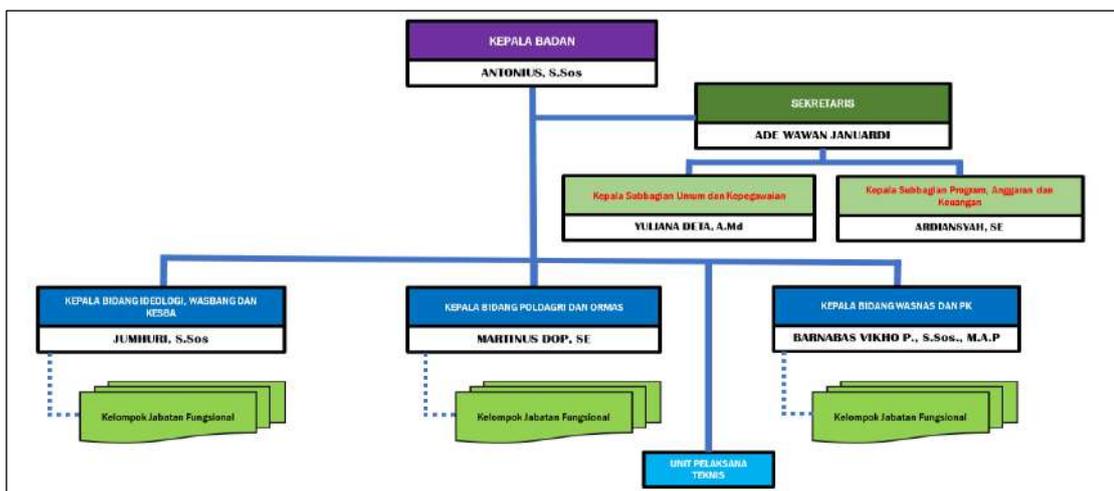
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dipimpin oleh kepala badan. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh beberapa unit kerja, yaitu sekretariat, dipimpin oleh sekretaris badan, dan bidang-bidang, dipimpin oleh kepala bidang.

Sekretaris badan dibantu kepala subbagian dan fungsional umum serta fungsional tertentu. Sedangkan kepala bidang, dibantu fungsional umum serta fungsional tertentu.

Secara rinci struktur atau bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1

#### STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SANGGAU



## 2.2 Sumber Daya Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau didukung sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kerja.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau saat ini berjumlah 25 orang (per 1 Januari 2024), terdiri dari 17 PNS dan 9 tenaga kontrak. Dari aspek jabatan, 1 orang eselon II.b, 1 orang eselon III.a, 3 orang eselon III.b, dan 2 orang eselon IV.a. Sedangkan dari aspek golongan ruang dan aspek pendidikan, sebagaimana dapat di lihat pada tabel 2.1, tabel 2.2, dan tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.1  
SUMBER DAYA MANUSIA  
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

NO	Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Non Golongan Ruang	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Laki-laki	-	2	10	3	8	23
2	Perempuan	-		2	-	1	3
	TOTAL	-	2	12	3	10	26

Keterangan : Non golongan ruang adalah tenaga kontrak

Tabel 2.2  
PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenis Kelamin	SMA/SMK	D3	D4/S1	S2	Jumlah
1	Laki-laki	5	-	8	2	15
2	Perempuan	-	1	1	-	2
	TOTAL	5	1	9	2	17

Tabel 2.3  
TENAGA KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenis Kelamin	SMA/SMK	D3	D4/S1	S2	Jumlah
1	Laki-laki	5	-	3	-	8
2	Perempuan	-	-	1	-	1
	TOTAL	5	-	4	-	9

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Secara rinci sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4  
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

No	Jenis Sarpras	Banyaknya	No	Jenis Sarpras	Banyaknya
1	Tanah dan bangunan	1 unit	18	Televisi	1 unit
2	Kendaraan bermotor roda empat	1 unit	19	Sound system	2 unit
3	Kendaraan bermotor roda dua	8 unit	20	Wireless	1 unit
4	Mesin absensi	1 unit	21	Camera film	2 unit
5	Lemari besi	2 unit	22	Alat rumah tangga lainnya	2 unit
6	Filling cabinet besi	6 unit	23	Meja kerja pejabat eselon II	1 unit
7	Brandkas	1 unit	24	Meja kerja pejabat eselon III	4 unit
8	Lemari kaca	2 unit	25	Meja kerja pejabat eselon IV	11 unit
9	Tempat tidur kayu	1 unit	26	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit
10	Meja ½ biro	8 unit	27	Kursi kerja pejabat eselon III	3 unit
11	Kursi rapat	20 unit	28	Lemari untuk arsip dinamis	2 unit
12	Kursi tamu	3 unit	29	Infocus/ proyektor	1 unit
13	Kursi putar	15 unit	30	Facsimile	1 unit
14	Mesin pemotong rumput	1 unit	31	Tablet	2 unit
15	Alat pendingin ruangan	11 unit	32	Komputer (laptop dan PC)	23 unit
16	Kompas gas	1 unit	33	Printer	15 unit
17	Rak piring	1 unit			

## 2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi

Harapan masyarakat secara umum terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau adalah meningkatnya cinta tanah air, kesatuan bangsa dan stabilitas politik di daerah yang kondusif. Sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan lancar. Harapan tersebut dapat diukur dari persentase konflik yang terselesaikan, persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang aktif, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Bercermin pada harapan tersebut, maka kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut.

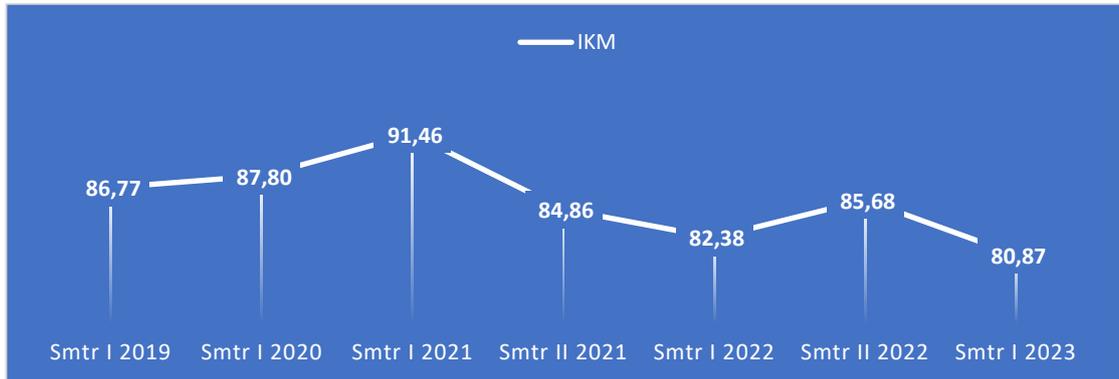
Tabel 2.5  
KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol	-	-	-	49,92	50	57	66	71	-	-	62,60	59,60	-	-	-	109,8	90,3	-	
Persentase konflik sosial yang terselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	-	-	-	81	85,70	90,5	95,2	94,00	90,38	91,67	92,31	93,01	-	111,59	106,9	102,0	97,7	-	

Selain kinerja sebagaimana dalam tabel 2.5, dapat dilihat juga kinerja lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1. Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik

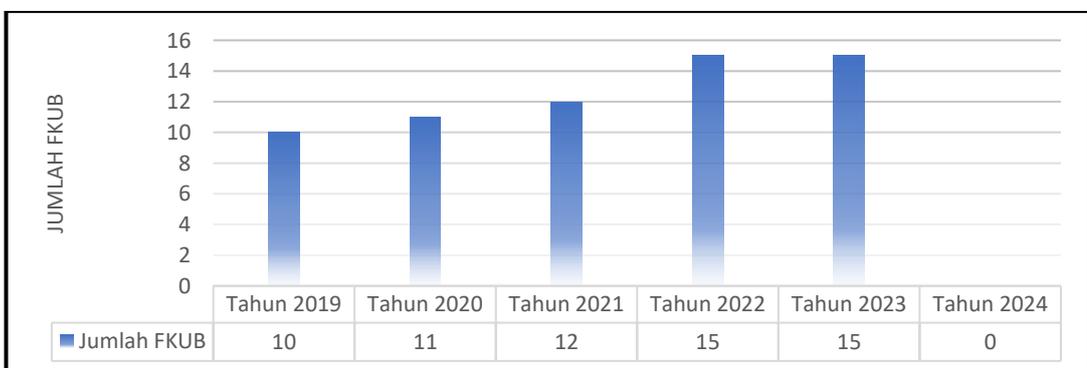


2) Zona kepatuhan terhadap standar layanan publik di daerah

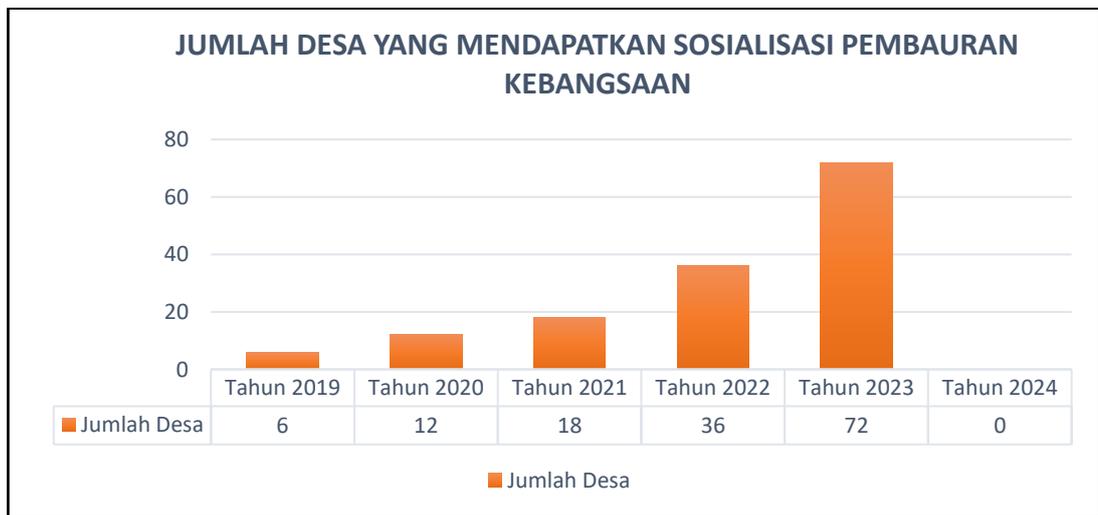
No	Tahun	Zona
1	2020	Kuning
2	2021	Hijau
3	2022	Hijau

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekomomi, Sosial, Budaya, Agama

1) FKUB kecamatan sudah terbentuk di 15 kecamatan, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

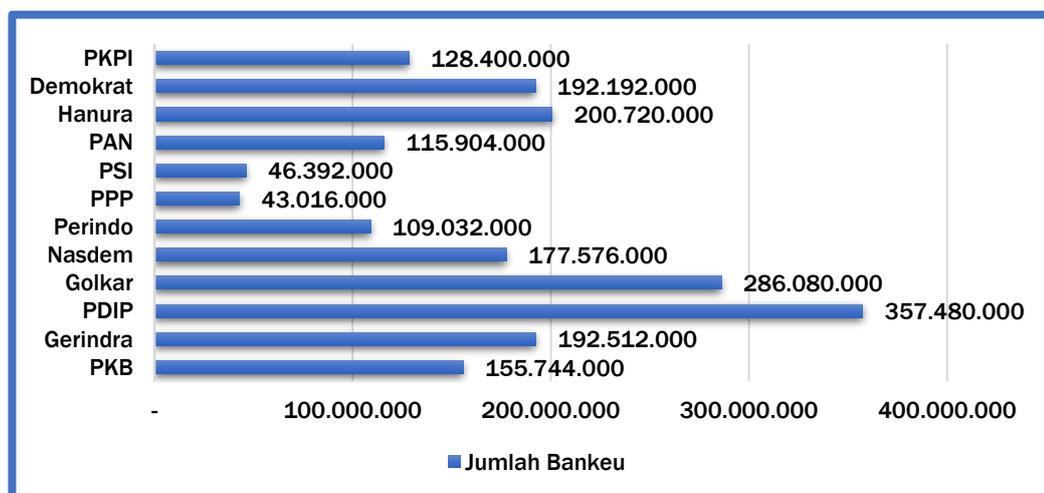


2) Jumlah desa yang sudah memperoleh sosialisasi pembauran kebangsaan.



### 3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

- 1) Besaran jumlah bantuan keuangan kepada partai politik Pemilu 2019 setiap tahun (mulai tahun 2020) dengan total Rp2.005.048.000,00.



- 2) Jumlah organisasi masyarakat

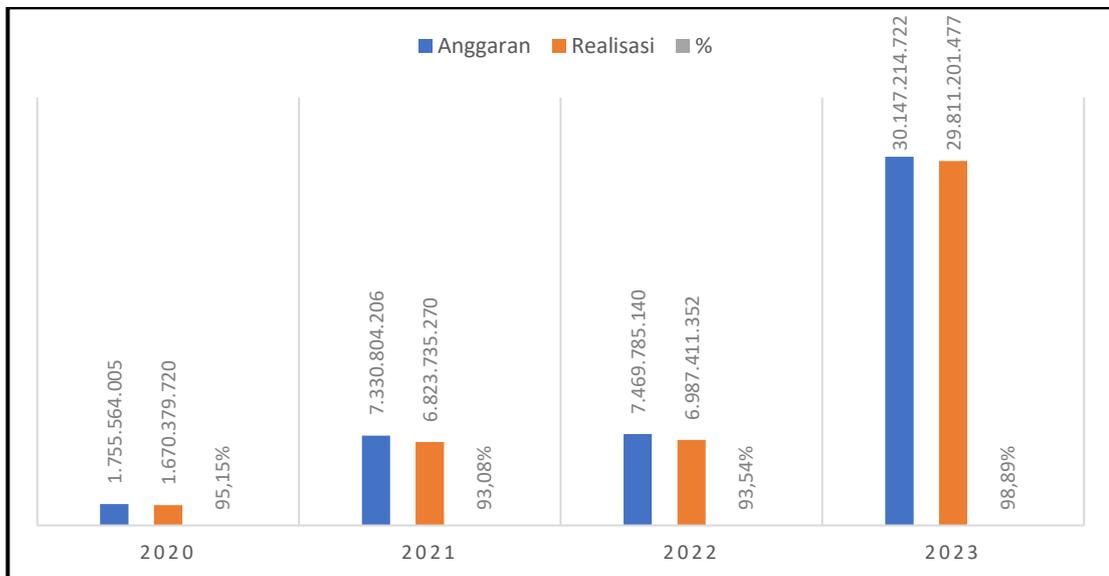
No	Tahun	Jumlah Ormas	Jumlah Ormas Asing
1	2020	89	-
2	2021	105	-
3	2022	115	-
4	2023	123	-

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, maka setiap tahun dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2020, sebesar Rp1.755.564.005,00 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp30.147.214.722,00. Peningkatan yang signifikan ini untuk hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Secara rinci anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau beserta realisasi selama tahun 2020-2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2023**



## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau yaitu :

1. Unit Kerja Sekretariat : seluruh pegawai dan seluruh unit kerja bidang yang ada di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau;
2. Unit Kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama : Masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dll), anggota paskibraka, FKUB, FPK, dan perangkat daerah.
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan : partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dll).
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik : masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kecamatan, dll) dan pengurus FKDM.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Permasalahan

---

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:

- 1) Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan
  - a. Implementasi aparatur terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah.
  - b. Budaya kerja yang baik sebagai implementasi reformasi birokrasi masih rendah.
  - c. Rasio ASN terhadap unit kerja organisasi masih belum ideal.
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
  - a. Wawasan kebangsaan, nasionalisme dan nilai-nilai ideologi Pancasila belum merata diseluruh wilayah desa dan cenderung mulai luntur/menurun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seiring pengaruh globalisasi.
  - b. Kesadaran dan solidaritas terhadap bela negara belum maksimal.
  - c. Pembauran kebangsaan intra dan antar suku serta umat beragama masih kurang.
  - d. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di masyarakat seiring berkembangnya akses informasi dan transportasi serta meningkatnya pendapatan masyarakat.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
  - a. Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
  - b. Masih belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  - a. Tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mendeteksi dan mencegah munculnya konflik sosial masih rendah.
  - b. Belum optimalnya dukungan FKDM di tingkat kecamatan sampai ke desa dalam membantu pemerintah mencegah terjadinya konflik.
  - c. Tingkat kerawanan konflik di wilayah kecamatan atau desa masih tinggi.
  - d. Paham terorisme dan radikalisme masih berkembang di masyarakat.
  - e. Monitoring terhadap keberadaan orang asing di daerah masih rendah.

Berdasarkan permasalahan di atas, pokok permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:

1. Rendahnya profesionalisme aparatur;
2. Menurunnya nasionalisme berbangsa dan bernegara di masyarakat.

### **3.2 Isu Strategis**

---

Stabilitas wilayah yang kokoh didukung persatuan dan kesatuan yang kuat, merupakan modal utama bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, upaya dan langkah guna memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di atas keberagaman suku, agama, bahasa dan sebagainya, perlu senantiasa dilakukan sesuai situasi yang dihadapi.

Kabupaten Sanggau yang majemuk, sangat potensial terhadap kerawanan konflik sosial dan politik di masyarakat, jika tidak dikelola secara baik. Selain kemajemukan masyarakat yang rawan konflik, terdapat beberapa permasalahan lain yang merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya kesadaran dan masih lemahnya penegakan hukum. Selain itu, kondisi masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap demokrasi, berpolitik, dan kelestarian lingkungan hidup, sangat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam mewujudkan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat yang damai.

Memperhatikan situasi yang berkembang di Kabupaten Sanggau dewasa ini, dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut :

1. Tuntutan terhadap transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani;
3. Peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai ideologi Pancasila melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah.
4. Peningkatan pendidikan, etika dan budaya politik di masyarakat.
5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat.
6. Penguatan peran ormas dalam pembangunan daerah.
7. Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan moderasi beragama.
8. Penguatan peran serta masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.
9. Meningkatkan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menghadapi isu-isu strategis dan menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau tahun 2025-2026 sebagai berikut :

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah; dan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya.

##### b. Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol;
2. Meningkatnya penanganan konflik sosial; dan
3. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan;

Indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau pada tahun 2025-2025, dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4  
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA  
TAHUN 2025 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN	
				2025	2026
1.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah		Nilai SAKIP	65	70
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	65	70
2.	Terwujudnya peningkatan kehidupan sosial politik dan berbudaya		Angka konflik SARA	0	0
		1) Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100
		2) Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan & organisasi politik dlm pembangunan	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	93	95

## 4.2 Cascading Kinerja Organisasi

*Cascading* atau penjabaran/penyelarasan dari sasaran strategis ke program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak diwujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau tahun 2025-2026 sebagai berikut .

### CASCADING BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SANGGAU

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah				Nilai SAKIP
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol			Nilai SAKIP Badan Kesbangpol
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya</b>				Angka konflik SARA
	<b>Meningkatnya penanganan konflik sosial</b>			Persentase konflik sosial yang terselesaikan
		<b>PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		

		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
			Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan</b>			<b>Persentase ormas dan orpol yang aktif</b>
		PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

---

Strategi yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis periode tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas implementasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Peningkatan penghayatan, pengamalan dan pembumihian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat;
3. Peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah;
4. Peningkatan kinerja forum kewaspadaan dini masyarakat; dan
5. Peningkatan kinerja forum kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan di daerah.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

---

Arah kebijakan yang akan dijalankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dalam rangka melaksanakan strategi guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis periode tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja organisasi;
2. Penataan dan peningkatan sarana serta prasarana kinerja organisasi;
3. Peningkatan dan pemantapan kompetensi aparatur;
4. Penguatan sistem dan budaya kerja organisasi;
5. Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah;
6. Pembinaan pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh elemen masyarakat desa;
7. Pembentukan paskibra dan pembinaan purna paskibra;
8. Penguatan forum pembauran kebangsaan di kecamatan;
9. Pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di daerah;
10. Peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik;
11. Peningkatan koordinasi serta kerjasama tim dan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam penanganan menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan;

12. Peningkatan pengawasan dan penanganan orang asing serta lembaga asing di daerah;
13. Fasilitasi penanganan konflik sosial;
14. Fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah;
15. Fasilitasi penguatan kapasitas dan kualitas forum kerukunan umat beragama kabupaten dan kecamatan;
16. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Secara rinci strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau periode 2025-2026, dapat dilihat dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol	Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas implementasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja organisasi.</li> <li>2. Penataan dan peningkatan sarana serta prasarana kinerja organisasi.</li> <li>3. Peningkatan dan pemantapan kompetensi aparatur</li> <li>4. Penguatan sistem dan budaya kerja organisasi</li> </ol>
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial politik & berbudaya	2.1 Meningkatkan penanganan konflik sosial	2.1.1. Peningkatan penghayatan, pengamalan dan pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah.</li> <li>2. Pembinaan pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh elemen masyarakat desa.</li> <li>3. Pembentukan paskibra dan pembinaan purna paskibra;</li> <li>4. Penguatan forum pembauran kebangsaan di kecamatan.</li> </ol>
		2.1.2. Peningkatan kinerja forum kewaspadaan dini masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi serta kerjasama tim dan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam penanganan menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan</li> <li>2. Peningkatan pengawasan dan penanganan orang asing serta lembaga asing di daerah.</li> <li>3. Fasilitasi penanganan konflik sosial.</li> </ol>
		2.1.3. Peningkatan kinerja forum kerukunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penguatan kapasitas dan kualitas forum kerukunan</li> </ol>

		umat beragama & pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah.	umat beragama kabupaten dan kecamatan. 2. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
	2.2 Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah	1. Pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di daerah 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan target kinerja sesuai tujuan dan sasaran selama 2 (dua) tahun mendatang, total rencana anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sebesar Rp29.745.552.424,31. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 5 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 7 sub kegiatan, yaitu :
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
    - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
    - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
    - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
    - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
    - 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; dan
    - 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
    - 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan
    - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu:
    - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
    - 1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
  - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 8 sub kegiatan, yaitu :
    - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.5.6 Penyediaan Bahan/Material;
- 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
- 1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
  - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 1.6.2 Pengadaan Mebel; dan
  - 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
  - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu:
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
  - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan tersebut terbagi atas 10 subkegiatan, sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka;
  - 7) Pembentukan Paskibraka;
  - 8) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
  - 9) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
  - 10) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan tersebut terbagi atas 5 sub kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; dan
  - 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan tersebut terbagi atas 5 sub kegiatan, sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; dan
  - 3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - 4) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan tersebut terbagi atas 5 sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - 3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - 4) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; dan
  - 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik, dengan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan tersebut terbagi atas 6 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program Kerja dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci pendanaan yang dibutuhkan dan dialokasikan disetiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan kinerja periode 2025-2026, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TAHUN			
							2025		2026	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah					Nilai SAKIP	59,60	65		70	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesbangpol				Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	59,60	65		70	
			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>		Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	59,60	65	<b>6.074.552.071,10</b>	70	<b>6.625.104.570,41</b>
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Kesbangpol	9	9	<b>2.634.318.783,20</b>	9	<b>2.895.476.764,02</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			62.396.994,00		68.636.693,40
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.898.700,00		7.988.570,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6.565.812,00		5.150.062,50
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil			5.015.664,00		6.015.664,00

				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2.530.000,00	2.783.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.015.664,00	5.517.230,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.544.895.949,20	2.799.385.544,12
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya laporan bulanan pengelolaan keuangan lingkup Badan Kesbangpol (laporan)	12	12	<b>2.564.895.949,20</b>	12 <b>2.819.385.544,12</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1.562.085.839,60	1.718.294.423,56
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			896.824.979,60	986.507.477,56
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			54.516.000,00	59.967.600,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			14.002.295,00	14.402.524,50
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			37.466.835,00	40.213.518,50
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah Badan Kesbangpol (laporan)	3	3	<b>24.380.000,00</b>	3 <b>25.018.000,00</b>
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.380.000,00	7.018.000,00
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			18.000.000,00	18.000.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kesbangpol (dokumen)	5	5	<b>65.581.600</b>	5 <b>52.114.760</b>

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			12.750.000		-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			52.831.600,00		52.114.760,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum Badan Kesbangpol (laporan)	1	1	<b>178.205.230,00</b>	1	<b>193.950.343,00</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			792.000,00		871.200,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.831.600,00		60.843.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			4.451.000,00		5.451.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			5.451.000,00		6.451.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.000.000,00		16.000.000,00
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material			34.566.180,00		38.022.798,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.300.000,00		65.730.000,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.813.450,00		581.345,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Kesbangpol			<b>241.753.253,00</b>		<b>265.428.578,00</b>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			180.180.000,00		198.198.000,00
			Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel			16.573.253,00		17.230.578,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.000.000,00		50.000.000,00

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kesbangpol (bulan)			<b>131.763.416</b>		<b>136.711.357</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		1.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			47.782.115,70		52.560.327,27
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.784.000,00		80.784.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.697.300,00		1.867.030,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah pada Badan Kesbangpol (unit)			<b>233.653.840,00</b>		<b>237.019.224,00</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.500.000,00		6.050.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			28.153.840,00		30.969.224,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00		200.000.000,00
Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya					Angka konflik SARA	0	0		0	
	Meningknya penanganan konflik sosial				Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100		100	

			<b>PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di desa	51	4	<b>2.942.488.521,70</b>	<b>4</b>	<b>3.236.737.373,75</b>
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			<b>2.942.488.521,70</b>		<b>3.236.737.373,75</b>
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			14.462.236,80		15.908.460,48
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.413.758.481,30		1.555.134.329,43
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			45.000.000,00		50.000.000,00
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			45.000.000,00		50.000.000,00

				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			14.268.104,40		15.694.914,84
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			80.000.000,00		85.000.000,00
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka			302.071.453,20		332.278.598,00
				Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka			797.928.246,00		877.721.071,00
				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			150.000.000,00		150.000.000,00
				Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila			45.000.000,00		55.000.000,00
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila			35.000.000,00		50.000.000,00
	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan				Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	93,01	94		95	

			<b>PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		Jumlah parpol penerima bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3.711.624.494,80</b>	<b>12</b>	<b>4.079.786.944,28</b>
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah parpol penerima bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik	12	12	3.711.624.494,80	12	4.079.786.944,28
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.964.636.785,00		3.261.100.463,50
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			66.987.967,20		73.686.763,92

				Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			60.000.000,00	65.000.000,00	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			70.000.000,00	75000000	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			549.999.743	604.999.717	
			<b>PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		Jumlah ormas yang terdaftar di Pemerintah Daerah	128	143	<b>748.218.308,7</b>	<b>158</b>	<b>822.040.139,6</b>

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Jumlah ormas yang terdaftar di Pemerintah Daerah	128	143	<b>748.218.308,70</b>	<b>158</b>	<b>822.040.139,57</b>
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			170.162.279,10		187.178.507,01
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			30.000.000,00		35.000.000,00
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			418.056.029,60		459.861.632,56
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			75.000.000,00		80.000.000,00
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			55.000.000,00		60.000.000,00

Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya					Angka konflik SARA		0		0	
	Meningkatnya penanganan konflik sosial				Persentase konflik sosial yang terselesaikan		100		100	
			<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		Persentase FKUB Kecamatan yang aktif	53	74	<b>325.000.000,00</b>	100	<b>350.000.000,00</b>
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Terbentuknya FKUB di tingkat kecamatan	8	11	<b>325.000.000,00</b>	15	<b>350.000.000,00</b>
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			60.000.000,00		65.000.000,00
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			50.000.000,00		55.000.000,00
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			70.000.000,00		75.000.000,00

				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			70.000.000,00		75.000.000,00
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			75.000.000,00		80.000.000,00
			<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		Persentase kecamatan yang telah terbentuk FKDM	53	10	<b>400.000.000</b>	100	<b>430.000.000</b>
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah FKDM aktif	8	12	<b>400.000.000</b>	15	<b>430.000.000</b>
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			70000000		75000000

				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			70.000.000,00		75.000.000,00
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			60.000.000,00		65.000.000,00
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			70.000.000,00		75.000.000,00
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang			70.000.000,00		75.000.000,00

				antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000,00		65.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>4.201.883.396,30</b>		<b>15.543.669.028,01</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya, pada akhirnya akan mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sangatlah penting dan strategis.

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan peran strategis tersebut, dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau beserta target kinerja selama periode 2025-2026, dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SANGGAU  
PERIODE TAHUN 2025-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra	Target Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			2025	2026	
1	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	62,60,	65	70	70
2	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100	100	100
3	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	92,31	93	95	95

Masing-masing indikator kinerja sebagaimana di atas, dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2  
**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SANGGAU**

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Σ nilai bobot komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021
2	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	$\frac{\sum \text{konflik SARA yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik SARA}} \times 100\%$
3	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif	$\frac{\sum \text{ormas dan parpol yang terdaftar dan aktif}}{\sum \text{ormas dan parpol yang terdaftar se Kabupaten Sanggau}} \times 100\%$

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 pada hakekatnya merupakan dokumen resmi yang berisi “janji” dan pedoman bagi ASN di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, dengan tetap berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, renstra ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unit kerja maupun dengan instansi terkait di lingkungan eksternal organisasi, dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam rangka pelaksanaan renstra ini, implementasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengendalian dan evaluasinya dilakukan secara tertib dan obyektif. Disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Badan yang terintegrasi dalam Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau.

Dengan terselenggaranya semua program serta terwujudnya semua tujuan dan sasaran beserta kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam dua tahun ke depan akan terbangun tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang cinta persatuan dan kesatuan, sehingga tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.